

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daerah menjadi semakin mandiri di dalam pelaksanaan pemerintah maupun pembangunan daerahnya masing-masing melalui penyerahan pengelolaan wilayahnya sendiri. Dengan demikian daerah mampu membiayai pelaksanaan urusannya sendiri sebab sumber-sumber pembiayaan sudah diserahkan sehingga terwujud kemandirian daerah.

Kemandirian daerah dapat membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan untuk peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakatnya yang merupakan tujuan dasar penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi Daerah merupakan wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Abdul Halim, 2002). Agar dapat terwujud tujuan penyelenggaraan otonomi daerah maka daerah perlu diberi kewenangan untuk memungut sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah (PERDA) seperti dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba dari perusahaan Milik Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Y. Joni Pambelum dan Napa J. Awat (2005) melakukan penelitian tentang pengaruh sistem insentif terhadap efektivitas kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya dengan sampel lima jenis Pendapatan Asli Daerah yaitu: Pajak Hotel dan Restoran, Retribusi Pasar,

Retribusi Sewa Toko dan Los Bangunan, Retribusi Pelayanan Kebersihan dan Retribusi Parkir. Dari penelitian tersebut, ditemukan bahwa hubungan antara rasio insentif dan rasio kinerja dari lima jenis Pendapatan Asli Daerah tersebut selama lima tahun pengamatan mempunyai hubungan yang kuat dan bersifat negatif. Hal tersebut menunjukkan insentif mempunyai kecenderungan kuat meningkat sedangkan rasio kinerja mempunyai kecenderungan kuat menurun. Pengujian hipotesisnya menunjukkan bahwa sistem insentif tidak berpengaruh pada efektivitas kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya, sedangkan hasil deskriptifnya adalah terdapat kesenjangan antara jumlah anggaran PAD yang diusulkan dengan jumlah anggaran PAD yang ditetapkan dalam Perda APBD. Jumlah anggaran PAD yang diusulkan Dispenda kepada DPRD sesuai potensi riil masing-masing jenis PAD, sedangkan jumlah anggaran PAD yang ditetapkan dalam Perda APBD jauh melampaui jumlah PAD yang diusulkan. Hal ini menyebabkan aparat pelaksana pemungutan tidak mampu mencapai jumlah anggaran PAD yang ditarget dalam APBD.

Dalam teori organisasi modern, bahwa para karyawan akan termotivasi untuk produktif dalam bekerja jika kompensasi yang diberikan ikut mendukung pekerjaannya. Hal ini perlu diberlakukan pada Dinas Pendapatan Daerah dalam kegiatan pemungutan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah agar perbaikan sistem insentif mendorong peningkatan produktivitas para aparat pelaksana pemungut Pendapatan Asli Daerah meningkat. Peningkatan produktivitas para aparat pelaksana pemungutan Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat mendorong efektivitas kinerja pegawai Dinas Pendapatan Daerah dalam pencapaian target.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik mengambil judul: **“PENGARUH SISTEM INSENTIF TERHADAP EFEKTIVITAS KINERJA PEGAWAI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MADIUN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah adalah “Apakah sistem insentif berpengaruh terhadap efektivitas kinerja pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris bahwa “Sistem insentif berpengaruh terhadap efektivitas kinerja pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun”.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah :

1. Bagi Pembaca

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca serta dapat digunakan sebagai perbandingan untuk penelitian selanjutnya di bidang yang sama.

2. Bagi Pemerintah

Untuk dapat memberikan gambaran tentang pengaruh sistem insentif terhadap efektivitas kinerja sehingga dapat menentukan penghasilan yang layak bagi pegawai dispenda.

E. Sistematika Penulisan Laporan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan laporan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA & PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tinjauan pustaka tentang pengertian kinerja, pengukuran kinerja, kinerja Dinas Pendapatan Daerah, efektivitas, sistem insentif, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, tinjauan penelitian sebelumnya, kerangka konseptual atau model penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menerangkan tentang desain penelitian; populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel; variabel penelitian dan definisi operasional variabel; instrumen penelitian, lokasi dan waktu penelitian; prosedur pengumpulan data serta teknik analisis.

BAB IV ANALISIS DATA

Bab ini menerangkan deskripsi data, hasil pengujian hipotesis dan interpretasi hasil penelitian serta pembahasan terhadap penelitian sebelumnya.

BAB V SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya dan PEMDA.